PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019



OUTLINE

1

 DASAR HUKUM DAN SUBSTANSI RAKORTEK

2

 KESIAPAN DUKUNGAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA

1. DASAR HUKUM DAN SUBSTANSI RAKORTEK

A. DASAR HUKUM

Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

KOORDINASI KORTEK

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 melakukan **Sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1

PASAL 259 AYAT 4





B. SUBSTANSI RAKORTEK

- Kortekrenbang merupakan bentuk pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional
- Target pembangunan nasional merupakan kontribusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan





Tujuan Rakortek

- Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target,
 lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Terwujudnya pencapaian target pembangunan nasional secara sinergis antara Pusat dan Daerah





Output Rakortek

- Kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk pencapaian target pembangunan nasional.
- Bahan input bagi Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal RKP dan sebagai bahan input bagi Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD





Fungsi Forum Rakortek

- Melakukan konfirmasi terhadap program prioritas nasional, kesiapan lokasi dan target program prioritas
- Mengidentifikasi dan memastikan dukungan daerah dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas nasional
- Mengidentifikasi dan memastikan dukungan pusat melalui APBN dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas daerah

Pembagian Tugas

Kemendagri	K/L	Bappenas	Pemerintah Daerah	Notulen (Kemendagri dan Bappenas)
Mengarahkan dan mengatur jalannya pembahasan: 1) Time Management 2) Substansi Pembahasan 3) Kesepakatan Pembahasan	Memberikan informasi dan memasukan substansi terhadap Proyek K/L dan Proyek Daerah yang diusulkan Daerah	Memberikan justifikasi atas Proyek K/L dan Proyek Daerah yang mendukung Prioritas Nasional	Memberikan masukan terkait: 1) Kondisi dan Kebutuhan pembangunan di daerah 2) Urgensi Proyek Daerah dalam mendukung PN 3) Kesiapan lokasi dan rasionalisai target Proyek K/L	Mencatat dan Mendokumentasikan Hasil Kesepakatan Rakortek

Tindak Lanjut Rakortek

- 1. Pemerintah Pusat
- Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target dalam RKP
- Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L
- Menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbangnas
- 2. Pemerintah Daerah
- Penyempurnaan program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah yang mendukung PN dalam Ranwal RKPD dan Ranwal Renja PD
- Menjadi dasar pembahasan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Provinsi



2. KESIAPAN DUKUNGAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA

1. Penyelenggaraan Rakortek Region I (Wilayah Barat)

Lokasi penyelenggaraan Rakortek Region I (Wilayah Barat) di Grand Inna Hotel, Jln. Gereja No. 34 Padang, Sumatera Barat, dilaksanakan tanggal 25 Februari – 1 Maret 2019. dengan peserta dari 17 provinsi (Aceh, Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumbar, Sumsel, Babel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim dan Bali). Dengan peserta pusat dan daerah ±1000 orang.

2. Penyelenggaraan Rakortek Region II (Wilayah Timur)

Lokasi penyelenggaraan Rakortek Region II (Wilayah Timur) di Gran Sinyur Hotel, Jln. A.R.S Mohammad No. 7 Balikpapan, Kalimantan Timur, dilaksanakan tanggal 11-15 Maret 2019. dengan peserta dari 17 Provinsi (Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalut, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Sulbar, Gorontalo, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat). Dengan peserta pusat dan daerah ±1000 orang.

MEKANISME PELAKSANAAN & TATACARA PENGISIAN FORMAT KORTEKRENBANG 2019

Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Rapat Persiapan Teknis Rakortekrenbang Jakarta, 25 Januari 2019





- Tatacara Pengisian Format Rakortekrenbang (Form 0-1-4)
 - Mekanisme Pembagian Desk dan Waktu Pembahasan
 - Mekanisme Verifikasi dan Shortlist Usulan
- 4 Prioritas Nasional 2020



Format 0 – Target Sasaran Pembangunan Nasional

		1	NASIONAL				,			KESEPAKATAN	CATATAN KESEPAKATAN			
No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	LOKASI	TARGET NASIONAL YANG MENJADI BEBAN DAERAH	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	CAPAIAN Tahun n-2 (BASELINE)	TARGET (Tahun n-1)	TARGET NASIONAL DENGAN DAERAH	PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0 0		8		8 8			8	8 9			9 (9		
2														
Dst														

Format 0 merupakan format penyelarasan Target Sasaran Pembangunan Nasional antara target yang ditetapkan pusat dengan kemampuan pencapaian di daerah yang merupakan kontribusi antara K/L dengan Pemda

1	Meningkatnya produksi pangan (juta t	on					
	a. Produksi padi						
	b. Produksi jagung	Sasarar	n Pemba	ngunan	Nasio	nal dimaksud me	erupakan turunan dari sasaran makro
	c. Produksi kedelai	pembai	ngunan	yang da	apat dij	jabarkan dalam t	arget sasaran yang menjadi beban antara
	d. Produksi gula	busat d	lan daer	ah			
	e. Produksi daging sapi	Met 2	0,0-	V) /	0,0		
	f. Produksi ikan	11,91	13,6 ^{b)}	17,4	18,8		
	g. Produksi garam	0,1b)	1,1 ≒	4,1	4,5		
2	Meningkatnya akses pangan						
	Perubahan harga beras (persen)	3,34	0,34		0,5		
3	Meningkatnya kualitas konsumsi panj	gan			111		
	a. Konsumsi kalori (Kkal)	2.040=	2.1154	2.150	2.150		
	b. Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)	47,2 ^b	46,54	50,6	54,5		



Format 0 – Target Sasaran Pembangunan Nasional

	/		NASIONAL						DAERAH	w		KESEPAKATAN	CATATAN KESEPAKATAN	
No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	LOKASI	TARGET NASIONAL YANG MENJADI BEBAN DAERAH	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	CAPAIAN Tahun n-2 (BASELINE)	TARGET (Tahun n-1)	TARGET NASIONAL	PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1				_/_			8	3			9		
2														
Dst														

Kolom 2 merupakan Sasaran dari sub Agenda Prioritas atau Sasaran Utama dari Prioritas Nasiona (dalam RPJMN) serta merupakan Sasaran strategis dari Agenda Prioritas (dalam Renstra K/L)x

Kolom 2-6 bersumber dari Rancangan RPJMN 2020-2024 atau Rancangan Renstra K/L 2020-2024 (tahun rencana 2020) atau Rancangan RKP 2020 yang diambil dari aplikasi Krisna RKP (Pra Rakortek)

Untuk pengisian kolom 2-6 akan diisi oleh penanggungjawab PN di bappenas bersama mitra K/L nya, yang berkoordinasi dengan Dit. SUPD (Pra Rakortek)

Perhitungan angka final sasaran makro akan selesai di awal februari untuk kemudian diturunkan menjadi sasaran per bidang atau urusan (Pra Rakortek)





Format 0 - Target Sasaran Pembangunan Nasional

			NASIONAL						DAERAH			KESEPAKATAN	CATATAN KESEPAKATAN	
No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	LOKASI	TARGET NASIONAL YANG MENJADI BEBAN DAERAH	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	CAPAIAN Tahun n-2 (BASELINE)	TARGET (Tahun n-1)	TARGET NASIONAL DENGAN DAERAH	PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			8		8 8				0 8		/	9 (
2							\ .		8			5		,
Dst														

Kolom 7-10 merupakan usulan Target Sasaran Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen rencana atau rancangan dokumen rencana daerah yang merupakan kontribusi terhadap capaian Sasaran Pembangunan Nasional

Kolom 7 adalah rumusan isu strategis yang mendasari penetapan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen rencana atau rancangan dokumen rencana daerah

Kolom 8-10 adalah rumusan sasaran pembangunan daerah beserta indikator dan target yang ditetapkan dalam dokumen rencana atau rancangan dokumen rencana daerah (RPJMD atau Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPD Tahun 2020)

Kolom 11 & 12 adalah realisasi atau capaian dari sasaran pembangunan daerah sampai dengan tahun n-2 (tahun 2018) dan target yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun 2019), sebagai dasar penentuan target sasaran pembangunan yang ditetapkan daerah

Untuk pengisian Kolom 7-12 dapat dilakukan awal februari melalui aplikasi Krisna Selaras



Format 0 – Target Sasaran Pembangunan Nasional

			NASIONAL						DAERAH			KESEPAKATAN	CATATAN KESEPAKATAN	
No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	LOKASI	TARGET NASIONAL YANG MENJADI BEBAN DAERAH	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	CAPAIAN Tahun n-2 (BASELINE)	TARGET (Tahun n-1)	TARGET NASIONAL DENGAN DAERAH	PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1									8					1
2														1
Dst	¥													

- Kolom 13-15 merupakan kolom kesepakatan terhadap target pembangunan nasional beserta prakiraan kebutuhan anggaran dan indikasi sumber pendanaan
- Pengisian kolom 13-15 dilakukan pada saat pembahasan desk Rakortekrenbang
- Kolom 13 adalah kesepakatan terhadap angka target sasaran pembangunan nasional dengan melakukan penyesuaian terhadap target yang ditetapkan Pusat atau target yang ditetapkan daerah
- Kolom 14 adalah prakiraan terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan nasional yang disepakati jika terdapat gap antara target hasil kesepakatan dengan target yang ditetapkan daerah
- Kolom 15 adalah penentuan indikasi sumber pendanaan



Format 1 – Program/Kegiatan dan Proyek K/L yang mendukung Prioritas Nasiona

N/O	PROGRAM	KEGIATAN		PROYEK PRIORITAS NASIONAL KESEPAKATAN							KET		
10,000	PRIORITAS	PRIORITAS	USULAN K/L		USULAN DAERAH			DROVEY	TARGET	LOVACE	PRAKIRAAN		
			PROYEK	TARGET	LOKASI	PROYEK	TARGET	LOKASI	PROYEK	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				i i									
2													
Dst	1												

Kolom 2-3 adalah Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020 yang dijabarkan dari Prioritas Nasional Tahun 2020 (Pra Rakortek)

Kolom 4-6 adalah daftar rencana Proyek Prioritas Nasional yang diusulkan K/L dalam Rancangan Renja K/L Tahun 2020 melalui aplikasi **Krisna RKP** (Pra Rakortek)

Kolom 7-9 adalah daftar usulan daerah terhadap Proyek Prioritas Nasional (kewenangan pusat) yang diinput melalui aplikasi **Krisna Selaras** (Pra Rakortek)

Kolom 10-13 adalah daftar usulan proyek prioritas nasional yang disepakati dalam pembahasan desk Rakortek, yang dinilai berdasarkan dampak yang signifikan terhadap pencapaian PN dan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian PN



Format 4 – Program/Kegiatan dan Proyek K/L yang mendukung Prioritas Daerah

No.	PRIORITAS		USULAN DAERAH (<u>Kewenangan</u> Pusa				KES	SEPAKATA	N	VET
INO.	DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT K/L	PROYEK K/L	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN	DISETUJUI	TIDAK	CATATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	,		2							
Dst			9							

Kolom 2 adalah sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, yang bersumber dari Rancangan RKPD Tahun 2020

Kolom 3-7 adalah daftar usulan daerah terhadap Program/Kegiatan atau Proyek K/L (kewenangan pusat) yang dibutuhkan daerah atau sesuai dengan Prioritas Daerah, yang diinput melalui aplikasi **Krisna Selaras** (Pra Rakortek)

Kolom 8-10 adalah daftar usulan proyek K/L yang disepakati dalam pembahasan (Desk Rakortek), yang dinilai sesuai antara Agenda Prioritas K/L dengan Prioritas daerah

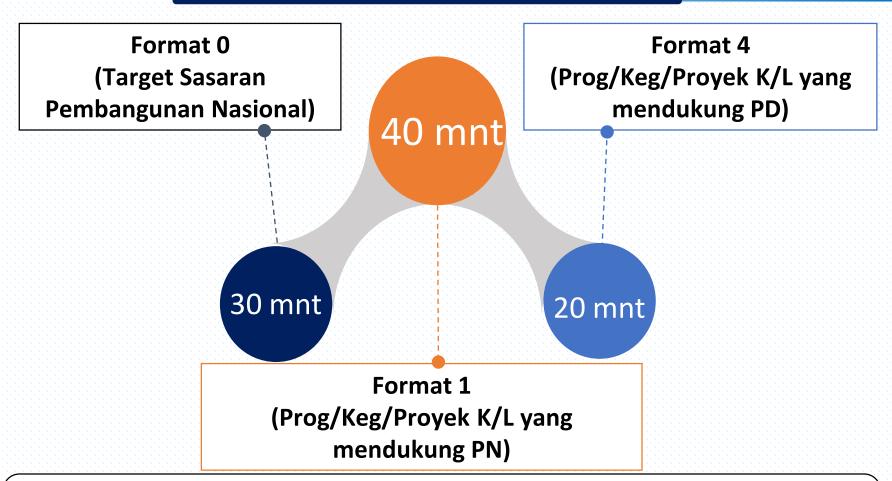


$\overline{}$
=
$\overline{}$
NA REG
1
⊱
-
(4)
~
_
PULKLING
\vdash
2
V.
7
4
7
<u>ت</u>
× •
F
17
3
7
Ů
č
Š
0
rene
Prend
הנסום
otorone
pterene
deterend
D
Keteren

Direktorat	Subdit	Jumlah	K/L	Prioritas
Direktorat	Subult	Desk	K/L	Nasional
	Pertanahan dan Tata Ruang	1	Kemen ATR/BPN	PN5
	ESDM	1	Kemen ESDM	PN4
			Kementerian Pertanian	
SUPD I	Pertanian dan Pangan	2	Badan Ketahanan Pangan Nasional	PN2, PN3, PN4
	Lingkungan Hidup	1	Kara and HIV	DNI2 DNI4
	Kehutanan	1	KemenLHK	PN3,PN4
	PU		l	2012 2014 2014
	Perkim	1	Kementerian PU dan PR	PN2, PN1, PN4
	Perhubungan	1	Kementerian Perhubungan	PN2
SUPD II	KKP		Kementerian Kelautan dan	DNI2 DNI2 DNI4
		1	Perikanan	PN2, PN3, PN4
	Kominfo Statistik dan Persandian	2	Kemenkominfo	PN2
	Kominio Statistik dan Persandian	۷	BPS	PINZ
	Kesehatan	1	Kementerian Kesehatan	PN1
	Sosbud	1	Kementerian Sosial	PN1
	Perindustrian dan Perdagangan	2	Kementerian Perdagangan	PN3
	Perindustrian dan Perdagangan		Kementerian Perindustrian	PINS
SUPD III	Pariwisata, PMD dan Urusan		Kementerian Pariwisata	
	Pemerintahan Dalam Negeri	3	Ditjen PMD Kemendagri	PN1, PN2, PN3, PN5
	remembalah balam Negeri		Ditjen Dukcapil Kemendagri	
	Koperasi UKM dan Penanaman Modal	2	Kementerian Koperasi dan UKM	PN3
	Roperasi Okivi dali Feriananian iviodai	۷	ВКРМ	FINS
	Pendidikan	1	Kemendikbud	PN1, PN3
	PPPA	1	KemenPPPA	PN1
	Pengendalian Penduduk dan KB	1	BKKBN	PN1
SUPD IV	Kepemudaan dan Olahraga, Kearsipan dan	1	Perpusnas	PN1
301 0 10	Perpustakaan		i ci pusitus	1111
			Kementerian Tenaga Kerja	
	Nakertrans	2	Kemendes dan PDT dan	PN2, PN3
			Transmigrasi	
	TOTAL	25		







Catatan Perbaikan untuk Rakortek 2019

- > Jumlah desk pembahasan perlu difokuskan untuk optimalisasi pembahasan format 0,1 dan 4
- Untuk desk Otsus, KPBU, BNPP, Adwil (Bencana), perlu penggabungan atau perampingan







Mekanisme Verifikasi Usulan Daerah

- Daerah menginput form Kontribusi APBD terhadap pencapaian PN, sebagai bahan penilaian komitmen daerah dalam mendukung pencapaian PN
- Bappeda memverifikasi usulan daerah, dengan menyaring usulan yang sudah tertuang dalam usulan K/L, maupun yang tidak terkait dengan pencapaian PN
- Verifikasi Direktorat SUPD:
 - ➤ Usulan Form 1 → dengan menilai usulan mana yang berdampak signifikan atau outputnya berdampak langsung terhadap pencapaian PN, untuk kemudian masuk sebagai shortlist usulan
 - ➤ **Usulan Form 4** → dengan **menilai** usulan yang sesuai dengan Prioritas Daerah namun merupakan kewenangan Pusat, untuk kemudian masuk sebagai **shortlist** usulan



Dari *longlist* usulan pada Form 1, dilakukan **penyaringan** dengan **menilai** usulan mana yang berdampak **signifikan** atau outputnya berdampak **langsung** terhadap pencapaian PN, untuk kemudian dibuat **shortlist** usulan

PROFES PRODUCTS NASKONAL NESEPARATIAN RET LONGS PROPER TARGET LONGS REBUTLHAN ANGGRAN A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 USULAN USUN USULAN USU

Shortlist usulan hasil penyaringan, merupakan usulan yang akan **dibahas** pada desk Rakortekrenbang

PROFEX PRODUITAS NASIONAL KESEAKATAN
PRODUITAS PROVEX TARGET LONASI PROVEX TARGET LONASI KEBUTUHAN ANGGARAN

10
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

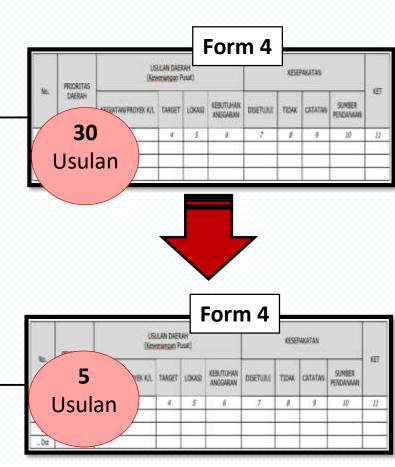
USULAN DASRAH PROVEX TARGET LONASI KEBUTUHAN ANGGARAN

Form 1

Mekanisme Verifikasi Usulan Daerah

Dari *longlist* usulan pada Form 4, dilakukan **penyaringan** dengan **menilai** usulan yang sesuai dengan Prioritas Daerah namun merupakan kewenangan Pusat, untuk kemudian dibuat *shortlist* usulan

Shortlist usulan hasil penyaringan, merupakan usulan yang akan **dibahas** pada desk Rakortekrenbang









Referensi Awal Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Tahun 2020



PN 1
Pembangunan
Manusia

PP 1 – Pengurangan Kemiskinan

- KP 1 Bantuan Sosial Tepat Sasaran (Reg)
- KP 2 Sistem Jaminan Sosial (Rea)
- KP 3 Literasi untuk Kesejahteraan (Per)
- KP 4 Reforma Agraria (Req)
- KP 5 Akses Kelola SDA melalui Perhutanan Sosial (Per)

PP2 – Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

- KP 1 Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (Reg)
- KP 2 Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi (Reg)
- KP 3 Gerakan Masyarakat Sehat (Reg)
- KP 4 Penurunan Stunting (Per)
- KP 5 Pengawasan Obat dan Makanan (Reg)

PP3 – Layanan Pendidikan Berkualitas

- KP 1 Kualitas Tenaga Pendidik (Reg)
- KP 2 Afirmasi
 Pendidikan (Reg)
- KP 3 Kelembagaan Satuan Pendidikan (Reg)
- KP 4 Kualitas Pembelajaran dan Akademik (Reg)

PP 4 – Akses Perumahan dan Permukiman Layak

- KP 1 Akses Hunian Layak dan Terjangkau (Reg)
- KP 2 Akses Infrastruktur Dasar, Air Minum dan Sanitasi (Rea)
- KP 3 Kualitas Lingkungan Permukiman (Reg)

PP 5 — Tata Kelola Layanan Dasar

- KP 1 Layanan dan Rujukan Satu Pintu (Reg)
- KP 2 Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Per)
- KP 3 Pencapaian SPM di Daerah (Per)

15







PN 2 Penguatan Konektivitas

PP 1 -Konektivitas dan TIK

- KP 1 Pelabuhan Hub dan Feeder Jalur Utama dan Subsidi Tol Laut (Per)
- KP 2 Transportasi Multimoda dan Perkotaan (Per)
- KP 3 Bandara pada alur Utama Transportasi (Per)
- KP 4 Fasilitas Keselamatan Transportasi (Reg)
- KP 5 Infrastruktur TIK (Reg)
- KP 6 Ekosistem TIK menuju Ekonomi Digital (Reg)

PP2 -Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

- KP 1 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan (Per)
- KP 2 Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi (Per)
- KP 3 Pembangunan Desa (Per)

PP3 -Penanggulangan Bencana

- KP 1 Kapasitas Penanggulangan Bencana (Per)
- KP 2 Sarana dan Prasarana Kebencanaan (Req)
- · KP 3 Tanggap Darurat dan Pemulihan Pascabencana (Per)
- KP 4 Manajemen Kebencanaan (Reg)

PP 4 -Sistem Logistik

- KP 1 Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan (Per)
- KP 2 Sarana Angkut Perikanan, Kelautan dan Perikanan (Per)
- KP 3 Industri Pendukung Sistem Logistik (Per)
- KP 4 Infrastruktur Energi dan Transportasi Sistem Logistik (Per)

PP 5 -Pembangunan Papua dan Papua Barat

- KP 1 Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan TIK (Per)
- KP 2 Pengelolaan Wilayah Pedalaman (Per)
- KP 3 Komoditas Unggulan (Per)

16







PP 1 – Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian

Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

PP2 -

PP3 – Nilai Tambah Jasa Produktif PP 4 – Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

- KP 1 Hasil Pertanian, Perikanan,
 Kehutanan dan Jasa Lingkungan (Per)

 Inve
- KP 2 Industri Pengolahan Hasil Pertanian,
 Perikanan dan Kehutanan (Per)
- KP 3 Mutu, Sertifikasi dan Standardisasi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Per)
- KP 4 Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Per)
- KP 5 Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Per)

- KP 1 Iklim Usaha dan Investasi (Per)
- KP 2 Industri Hulu Non Agro dan Pendukung (Per)
- KP 3 Daya Saing Industri Andalan non Pangan (Per)
- KP 4 Kawasan Industri dan KEK Industri (Per)

- KP 1 Kawasan Pariwisata, KEK Pariwisata da Penguatan Destinasi Unggulan (Ini)
- KP 2 Struktur Ekonomi Kreatif (Ini)
- KP 3 Kemitraan UMK dengan UM2B (Per)
- KP 4 Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Per)
- KP 5 Akses Keuangan dan Pembiayaan (Per)

- KP 1 Kerjasama dengan Dunia Usaha (Per)
- KP 2 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Per)
- KP 3 Sistem Sertifikasi Kompetensi (Per)
- KP 4 Keterampilan Wirausaha (Per)

PP 5 – IPTEK dan Inovasi untuk Produktivitas

- KP 1 Litbang Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivita (Per) s
- KP 2 Teknologi Pengungkit Produktivitas (Per)
- KP 3 SDM IPTEK (Peneliti dan Perekayasa) (Per)
- KP 4 Inovasi dan
 Penguasaan Teknologi
 Frontier (Per)
 17



Referensi Awal Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Tahun 2020



PN 4
Pemantapan
Ketahanan
Energi, Pangan
dan Sumber
Daya Air

PP 1 – Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

PP2 -

- KP 1 Produksi dan Cadangan Migas (Per)
- KP 2 Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik (Per)
- KP 3 EBT Mineral (Per)
- KP 4 Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri (Per)
- KP 5 Efisiensi Energi (Per)

- KP 1 Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan (Reg)
- KP 2 Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan (Per)
- KP 3 Kualitas Konsumsi Pangan(Reg)
- KP 4 Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan (Per)
- KP 5 Cadangan dan Stabilitas Harga Pangan(Reg)

PP3 – Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibiltas Air

- KP 1 Pemulihan dan Pemeliharaan Sumber Air dan Ekosistem (Per)
- KP 2 Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif (Rea)
- KP 3 Pemulihan Pengendalian Air Permukaan dan Air Tanah (Per)
- KP 4 Regulasi Kelembagaan dan Pengelolaan SDA (Per)

PP 4 – Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

- KP 1 Pencegahan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup (Reg)
- KP 2 Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Reg)
- KP 3 Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan LH (Per)

18

 KP 4 Kelembagaan dan Regulasi (Per)



Referensi Awal Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Tahun 2020



Republik Indonesia

PN 5 Stabilitas Keamanan Nasional

PP 1 – Kamtibnas dan Keamanan Siber

- KP 1 Kondisi Keamanan Nasional (Reg)
- KP 2 Penanganan Konflik Sosial (Reg)
- KP 3 Penanganan Penyalahgunaan Narkoba (Reg)
- KP 4 Kelembagaan Siber serta Identifikasi, Deteksi, Proteksi Penanggulangan dan Pemulihan Dampak Kejahatan (Reg)
- KP 5 Penanggulangan Terorisme (Reg)

PP2 – Kesuksesan Pemilihan Umum

- KP 1 Lembaga Demokrasi (Reg)
- KP 2 Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil (Reg)
- KP 3 Pengamanan Pemilihan Umum (Reg)
- KP 4 Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum (Reg)
- KP 5 Kualitas dan Keterbukaan Informasi (Rea)

PP3 – Pertahanan Wilayah Nasional

- KP 1 Pertahanan Wilayah Nasional (Reg)
- KP 2 Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara (Reg)
- KP 3 Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi (Reg)

PP 4 – Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

- KP 1 Penegakan Hukum (Reg)
- KP 2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Reg)
- KP 3 Integrasi egovernent (Ini)
- KP 4 Talent Management Nasional (Reg)

PP 5 – Efektivitas Diplomasi

- KP 1 Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri (*Reg*)
- KP 2 Diplomasi Maritim, Politik dan Keamanan (Reg)
- KP 3 Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional (Reg)
- KP 4 Peran Indonesia di ASEAN (Reg)





TERIMA KASIH